Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan teknologi sekarang ini sudah memasukki hampir seluruh sektor industri. Teknologi diakui sudah menjadi salah satu *enabler* bagi bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Pada jurusan sistem informasi, penulis mengambil fokus kepada *Enterprise Architecture*. Kegunaan *Enterprise Architecture* sendiri bagi perusahaan adalah sebagai jembatan utnuk penyelarasan antara strategi bisnis dan teknologi. Penulis disini menggunakan kerangka kerja *The Open Group of Architecture* atau yang selanjutnya akan disingkat menjadi TOGAF dengan metode *Architecture Development Method* atau yang selanjutnnya akan disebut ADM. Semakin kompleks suatu proses bisnis yang dimiliki perusahaan, maka kebutuhan dalam penggunaan IT juga akan semakin meningkat. Dampak perkembangan teknologi juga dirasakan oleh Direktorat Jendral Pajak Indonesia atau yang selanjutnya akan disebut sebagai DJP. Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan adalah campur tangan dari teknologi. Pada dirjen pajak terdapat dua proses bisnis utama, yang pertama adalah fungsi pembayaran, yang kedua adalah fungsi pelaporan. Pada fungsi pembayaran, proses yang terjadi cukup sederhana. Pada fungsi pelaporan, terdapat 3 subjek pelaporan yang berbeda, yaitu orang pribadi, badan usaha, dan bendaharawan.

DJP merupakan instansi pemerintah dibawah Kementrian Keuangan yang menangani perpajakan yang ada di Indonesia. Tugas DJP sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, teknis, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, Pelaksanaan administrasi DJP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kementrian keuangan.

Pada pembayaran pajak, terdapat tiga subjek yang berbeda. Subjek pertama adalah orang pribadi. Pada orang pribadi dikhususkan untuk para pegawai yang memiliki penghasilan, serta wirausaha. Subjek kedua adalah badan usaha. Pada badan usaha dikhususkan untuk badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha swasta. Subjek ketiga adalah bendaharawan. Pada bendaharawan dikhususkan untuk instansi perusahaan yang mempunyai proyek pembangunan, biasanya dibayarkan oleh bendahara negara. Bendahara negara mendapatkan uang pajak penghasilan dari *vendor* yang mengerjakan proyek.

Sesuai dengan yang telah tertera mengenai fungsi DJP menurut Peraturan Kementrian Keuangan, penulis beserta tim akan berfokus kepada fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan khususnya di bidang pelaporan. Bagi penulis sendiri, penulis akan berfokus di bidang pelaporan wajib pajak objek pertama, yaitu orang pribadi. Fungsi pelaporan sendiri berguna untuk memantau seluruh subjek wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu. Pada fungsi pelaporan tentunya terdapat beberapa masalah yang terjadi, baik pada pelaporan subjek orang pribadi, badan usaha, ataupun bendaharawan.

Pada fungsi pelaporan subjek orang pribadi, dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah untuk pegawai dengan penghasilan di bawah enam puluh juta rupiah. Bagian kedua adalah untuk pegawai dengan penghasilan di atas enam puluh juta rupiah. Bagian ketiga adalah untuk wirausaha. Pada fungsi pelaporan subjek orang pribadi, teknologi informasi sudah diimplementasikan dalam bentuk *e-filing*. Dimana portal *website e-filing* adalah aplikasi untuk melakukan pelaporan pajak dimanapun dan kapanpun karena aplikasi berbasis internet. Namun, aplikasi ini belum berjalan maksimal untuk bagian wirausaha. Karena bagi wirausaha diharuskan mengisi data pada aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi elektronik-Surat Pemberitahuan Tahunan atau yang disingkat e-SPT baru kemudian memasukkan data yang berekstensi .csv pada aplikasi *e-filing*.

Pada pelaporan baik *e-filing maupun e-SPT* belum tercipta integrasi dengan data harta yang dimiliki seperti sertifikat pajak bangunan bumi atau yang selanjutnya disebut PBB dan pajak kendaraan. Hal ini mengakibatkan kurangnya akurasi sang wajib pajak dalam pelaporan harta serta pembayaran pajak. Maka dari itu dengan adanya perancangan *Enterprise Architecture* diharapkan dapat tercipta integrasi sistem antar aplikasi pelaporan.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesiapan kondisi eksisting untuk implementasi *Enterprise Architecture* pada DJP khususnya fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perpajakan orang pribadi?

2. Bagaimana rancangan *Enterprise Architecture* yang baik untuk pengembangan integrasi sistem antara data PBB serta data kepemilikkan kendaraan dengan aplikasi *e-filing* maupun e-SPT?

Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan dari penelitian tugas akhir, yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan sistem eksisting untuk implementasi Enterprise Architecture pada DJP khususnya fungsi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perpajakan orang pribadi.

2. Membuat rancangan *Enterprise Architecture* yang baik untuk pengembangan intergasi sistem antara data PBB serta data kepemilikkan kendaraan dengan aplikasi *e-filing* maupun e-SPT.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu penulis beserta tim dapat menyusun serta merancang *Enterprise Architecture* yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan teknologi DJP khususnya pada fungsi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perpajakan orang pribadi.

Ruang Lingkup

Terdapat beberapa batasan yang dibutuhkan sehingga pembahasan tugas akhir tidak meluas dari objek yang diteliti, yaitu fungsi pelaporan perpajakan orang pribadi di DJP. Adapun batasan penelitian pada tugas akhir ini yaitu:

1. Penelitian hanya sampai pada tahap perancangan arsitektur, tidak berfokus ke tahap implementasi.

2. Analisis perancangan *enterprise architecture* terdiri dari rancangan yang sedang berjalan (*as-is)* serta rancangan target (*to-be*) dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM.